

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA
KARANGTENGAH KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh :

Mukhamad Mizan

1501046063

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul “Implementasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” benar-benar hasil karya sendiri, bukan menjiplak dari orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dari penulisan skripsi. Pendapat atau temuan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 30 Juni 2020

Mukhamad Mizan
1501046063

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA
KARANGTENGAH KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL**

Disusun Oleh:

MukhamadMizan

1501046063

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 09 Juli 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

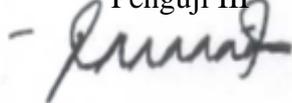
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Sulistio, S.Ag., M.Si.
NIP.19701020 199503 1 001

Penguji III



Dr. Agus Riyadi, MSI
NIP. 19800816 200710 1 003

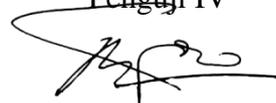
Mengetahui

Sekretaris/Penguji II



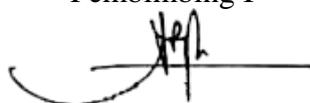
Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19660822 199403 1 003

Penguji IV



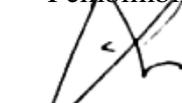
Dr. Hatta Abdul Malik, M.Ag.
NIP. 19800311 200710 1 00

Pembimbing I



Abdul Ghoni, M.Ag.
NIP. 197707092005011003

Pembimbing II



Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19800816 200710 1 003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 09 Juli 2020




Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 bandel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mukhamad Mizan
NIM : 1501046063
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : “ Perencanaan Patisipatif Pembangunan Manusia Di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal “

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

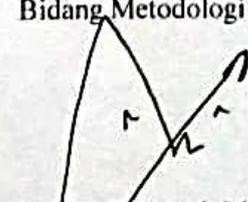
Bidang Substansi Materi


Abdul Ghoni M. Ag.
NIP. 197707092005011003

Semarang, 29 Juni 2020

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis


Drs. H. Kasmuri, M. Si.
NIP. 196608221994031003

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Faisol Amir dan Ibu Ruwaidahyang telah memberikan berbagai bentuk kasih sayang dari mulai saya lahir kedunia sampai sekarang. Terima kasih kepada ketiga saudara saya Akhmad Khoironi, Arif Zubaidi, dan Irkhamna Faella Shofa yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
2. Almameter tercinta, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan curahan rahmat, karunia, dan hidayahnya dan dapat menjadi insan yang memegang teguh keimanan kepada Nya serta kita semua dapat di kumpulkan kembali. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Semarang, 06 Juni 2020

Mukhamad Mizan
1501046063

MOTTO

اِذْ الْفَتَىٰ حَسَبَ اِعْتِقَادِهِ رَفَعَ ۖ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَجَاهُ لَمْ يَنْتَفِعْ

“Ketinggian Derajat Pemuda Tergantung Pada Keyakinannya

Setiap Manusia Yang Tidak Mempunyai Keyakinan, Maka Ia Tidak Ada
Gunanya”

(Nadzam Al-‘Imrithi)

ABSTRAK

Mukhamad Mizan (1501046063), Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang, “ *Implementasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat di Desa Karangtengah kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”, Pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), perencanaan pembangunan berjalan dalam suatu sistem berdasarkan proses, dimensi pendekatan, dan jangkauan waktu. Praktiknya pembangunan di daerah lebih menonjol karena perencanaan dan implementasinya bersifat sentralistik (*top-down*). Akibatnya, pemerintah daerah tak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa memperhatikan prioritas lokal.

Seiring dengan diterbitkan tentang Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa yang didasarkan pada dua asas yaitu rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan subdidaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat). Pelibatan masyarakat dalam perencanaan disebut sebagai perencanaan partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan dan hasil dalam perencanaan pembangunan partisipatif pembangunan manusia di desa karangtengah. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teoriansalisis milik Milles dan Huberman, yaitu analisis yang terdiri dari empat alur, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tahapan perencanaan partisipatif pembangunan manusia di Desa Karangtengah meliputi, *Pertama*, tahap persiapan. *Kedua*, Sosialisasi dari pemerintah desa ke masyarakat. *Ketiga*, Musyawarah dusun. *Keempat*, musyawarah desa. *Kelima*, Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 2) Hasil yang dicapai dalam tahapan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat meliputi, masyarakat lebih proaktif, meningkatnya rasa saling memiliki antara masyarakat, dan meningkatnya rasa kekeluargaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kata kunci : Implementasi Perencanaan Partisipatif, Pembangunan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin. Dengan izin Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan Desa Karangtengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam jurusan pengembangan masyarakat islam. Serta memberikan pengetahuan mengenai perencanaan partisipatif pembangunan di desa.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam upaya penulisan skripsi ini telah banyak hal yang dilalui oleh penulis. Dengan ucapan syukur alhamdulillah semua upaya yang dilakukan penulis akhirnya dapat membuahkan hasil yakni skripsi dengan judul “ Implementasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Perdesaan di Desa Karangtengah” dengan bantuan beberapa pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. Ilyas Supena, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang Bapak Sulistio, S.Ag, M.Si. dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.Si.
4. Bapak Abdul Ghoni, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Kasmuri, M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mengantarkan penulis hingga akhir studi.
6. Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta Perpustakaan Universitas bersama staff, yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memanfaatkan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Pemerintah Desa Karangtengah yang memberikan kesempatan untuk ruang belajar di lapangan dan memberikam mottivasi kepada penulis untuk selalu giat belajar.
8. Senior idaman saya sekaligus Sekretaris Desa karangtengah Bapak Mustahfid, S.Sos.i., yang selalu mendampingi, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Faisol Amir dan Ibu Ruwaidah , dan kepada kakak saya Akhmad Khoironi, Arif Zubaidi dan Irkhamna Faella Shofa yang tidak mengenal lelah untuk memberikan do'a, dorongan dan kerja kerasnya demi kelancaran pendidikan penulis.
10. Kepada bapak/ibu guru penulis yang telah membimbing dan mendampingi, semoga Allah SWT selalu memberikan anugrah kepada beliau-beliau dengan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dan seangkatan saya dalam organisasi mulai masuk UIN Walisongo yaitu Keluarga besar Ikatan Alumni Al-Anwar Semarang, keluarga besar PMII Rayon Dakwah, LEMBAGA BAHASA RADA PR-PMII Dakwah 2017 dan pengurus HMJ PMI periode 2016-2019, PERISAI 2015 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua.
12. Senior-senior PMII Rayon Dakwah dan DEMA FDK yang banyak memberikan ilmu kepada saya, mengajarkan perjuangan dan kerasnya berproses dalam organisasi. Muhammad Baihaqi, S.Sos, Aricha Lailatur Rosyida, S.Sos, Imam Syafi'i, S.Sos, Mas Ahmad Sirojudin, yang mendidik peneliti dari awal di PMII dan HMJ PMI sampai dapat menyelesaikan

skripsi ini, yang mengkader dari awal hingga saat ini, memberi bimbingan dan arahan kepada saya hingga saat ini.

13. Teman-teman kelas PMI-B 2015, teman-teman PPL Desa Karantengah, teman-teman KKN MIT VII Posko 66 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
14. Keluarga Roti Bakar Sekuter 21 terkhusus kepada Farid Hidayat, SE. dan partner As'ad Syamsul Hidayat dan Jamaluddin yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis disaat sedang down dan menjadi penghibur serta memberi pengalaman berwirausaha kepada penulis.
15. Teman seperjuangan Fitri Ariana Putri, S.Sos., yang selalu setia menemani dalam keadaan apapun, menjadi penyemangat, memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan mendoakan peneliti.
16. Keluarga Kos Pojok Ringin Sari 1 Ibu Kastimah yang memberikan kesempatan untuk jadi bagian keluarga, memberi semangat dan mendo'akan penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat menjalankan aktifitasnya.
17. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Selain ungkapan terimakasih, peneliti juga menghaturkan ribuan maaf apabila selama ini peneliti telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga perlu adanya perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan sosial.

Semarang, 30 Juni 2020

Mukhamad Mizan

1501046063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Definisi Konseptual	12
3. Lokasi Penelitian	12
4. Sumber dan Jenis Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	15

BAB II IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A.	Implementasi Perencanaan Partisipatif	17
1.	Pengertian Implementasi.....	17
2.	Pengertian Perencanaan Partisipatif.....	18
3.	Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif	19
4.	Proses dan Pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	20
5.	Tahapan dan Indikator Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa.....	22
6.	Manfaat Perencanaan Partisipatif.....	26
B.	Pembangunan Masyarakat	27
1.	Pengertian Pembangunan Masyarakat	27
2.	Pembangunan Masyarakat Sebagai Kerangka Dakwah..	29
3.	Asas dan Prinsip Pembangunan Masyarakat	31
4.	Strategi Pembangunan Masyarakat.....	32
5.	Tujuan Pembangunan Masyarakat	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.	Profil Desa karangtengah	33
1.	Sejarah Singkat Desa Karangtengah	33
2.	Letak Geografis Desa	34
3.	Jumlah Penduduk Desa Karangtengah Tahun 2020.....	35
a.	Jumlah Penduduk Desa Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
b.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	35
c.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir	36
d.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	37
4.	Visi dan Misi Desa Karangtengah.....	38
a.	Visi Desa.....	38

b. Misi Desa.....	38
5. Struktur Organisasi.....	39
6. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa.....	40
7. Tugas Fungsi dan Kewajiban BPD (Badan Pengawas Desa)	46
a. Tugas BPD.....	46
b. Fungsi BPD.....	47
c. Kewajiban BPD	47
B. Tahapan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Karangtengah.....	47
C. Hasil Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Karangtengah.....	52
BAB IV ANALISIS MENGENAI TAHAPAN DALAM PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA KARANGTENGGAH	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Karangtengah	34
Gambar 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangtengah	39
Gambar 3. Struktur BPD Desa Karangtengah.....	40
Gambar 4. Musyawarah Dusun.....	49
Gambar 5. Musyawarah Desa	50
Gambar 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	35
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir	37
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu adanya kewenangan yang seluas-luasnya kepada kabupaten dan kota dalam memberikan sentimen positif kepada penampungan aspirasi-aspirasi masyarakat lokal. Daerah diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan pembangunan daerahnya sendiri, namun konsep pembangunan daerah harus tetap berada pada lingkup pembangunan nasional. Pembangunan Daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena sebenarnya mereka yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Selain itu, mereka yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya.¹

Pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), perencanaan pembangunan berjalan dalam suatu sistem berdasarkan proses, dimensi pendekatan, dan jangkauan waktu. Praktiknya pembangunan di daerah lebih menonjol karena perencanaan dan implementasinya bersifat sentralistik (*top-down*). Akibatnya, pemerintah daerah tak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sistem perencanaan pembangunan pada masa orde baru merangkum proses perencanaan dari atas (*top-down*) lebih kuat dari pada proses perencanaan dari bawah (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan Indonesia pasca 1 Januari 2001 menggunakan teknik *top down* dan *bottom-up*. Namun

¹ Siti Nurfattimah Rahman, "Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa", Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hal:13

dalam kenyataannya masih banyak didominasi oleh pendekatan *top-down*, dimanapemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa memperhatikan prioritas lokal.

Teknik perencanaan dari atas ke bawah(*top-down planning*) adalah pendekatan pembangunan di mana penentuan keputusan tidak menampung aspirasi elemen dalam masyarakat. Teknik perencanaan(*top-down*)mengutamakan pengambilan keputusan dari atasankepada bawahannya. Tidak ada satupun yang menyangkal bahwa dampak dari metode *top down* yang diterapkan di era orde baru menghasilkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang menakjubkan secara presentase. Akan tetapi, kemajuan ini tidak diikuti oleh kemajuan bidang-bidang sosial masyarakat dalam meningkatkan rasa memiliki, lebih-lebih kepada program yang dimiliki.²

Di beberapa daerah terjadi ketimpangan pembangunan. Hal ini bukan karena kesalahan konsep, tetapi ketidakmampuan sistem pelaksanaan dalam menterjemahkan konsep tersebut ke dalam program operasional yang lebih baik. Ketidakmampuan ini diakibatkan oleh rendahnya kemampuan teknis aparat pelaksana, ketidakcocokan (rasionalisasi penerapan) antara program yang dibuat pemerintah pusat dengan kondisi daerah dan keinginan masyarakat. Akibatnya, masyarakat setempat tidak diberi kesempatan untuk terlibat pada penyusunan konsep atau tidak berdaya mempengaruhi atau merencanakan masa depan mereka. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi apatis terhadap pembangunan, merasa tidak berkepentingan dengan pembangunan yang pada akhirnya mengakibatkan permasalahan pembangunan. Dalam Islam, konsep pembangunan sebenarnya diisyaratkan untuk dilakukan dari bawah. Proses pembangunan dimulai dari gagasan atau ide masyarakat berdasarkan permasalahan yang dihadapi dengan musyawarah secara bersama untuk menemukan solusi. Adapun keterkaitan pembangunan dengan dakwah adalah proses pembangunan dimulai oleh dan diakhir oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan tahapan pembangunan partisipatif. Dengan demikian dakwah

²Mudrajad Kuncoro, “*Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal: 35-40.

dapat diartikan sebagai gerakan pembangunan oleh masyarakat untuk merubah dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam aspek jasmani dan rohani. Hal ini termaksud QS. Ali-Imran ayat 159 :

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.³

Konsep ini mengindikasikan pentingnya masyarakat dalam penyusunan program pembangunan dimulai dari bawah dengan bermusyawarah atau diskusi. *Bottom-Up Planning* (perencanaan dari bawah) merupakan perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah. Teknik *Bottom-Up Planning* berupaya melibatkan semua pihak sejak awal. Setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama antara pemerintah dengan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam perencanaan merupakan salah satu indikator penting dalam melaksanakan perencanaan ini. Teknik perencanaan *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dalam menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.⁴

³Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S: Ali-Imran ayat 159, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, hal: 159.

⁴Mudrajad Kuncoro, "Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal: 40-43.

Seiring dengan diterbitkan tentang Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa yang didasarkan pada dua asas yaitu rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan subdidaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat). Mengisyaratkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang telah disebutkan dalam Pasal 68 pasal 1 point c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵

Dalam konteks Undang-Undang Desa yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Permen ini menyatakan bahwa proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁶ Dengan demikian proses perencanaan yang baik menurut Undang-Undang Desa merupakan kerja kolektif antara segenap pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat secara bersama-sama dalam kedudukan yang seimbang.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan disebut sebagai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ditujukan agar ada hubungan erat antara masyarakat dan kelembagaan masyarakat secara berkelanjutan atau dalam salah satu prinsip pengembangan masyarakat biasa disebut dengan *Sustainable*. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan warga masyarakat desa itu sendiri.⁷

Dengan Demikian konsep perencanaan partisipatif adalah sebuah konsep perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh warga masyarakat dan

⁵Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 1 point c

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014, pasal 1

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014, pasal 1

kelembagaan desa secara nyata. Pelibatan keduanya dilakukan dalam aspek terlibat dalam seluruh kesatuan perencanaan pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan, memutuskan program, pelaksanaan sampai evaluasi program. Perencanaan partisipatif merupakan solusi untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa yang matang dengan memaksimalkan peran seluruh stakeholders.⁸

Pembangunan Masyarakat dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama. Pembangunan Masyarakat dalam lingkup perdesaan di bagi atas pembangunan fisik dan non fisik. Dalam konsep pembangunan secara fisik dilakukan dengan mengoptimalkan program berwujud sesuatu yang nyata atau infrastruktur perdesaan. Disisi lain pembangunan masyarakat desa secara non fisik lebih di spesifikasikan kepada pembangunan spiritual masyarakat desa yang dalam istilah nya bisa disebut dengan Dakwah. Hakekatnya adalah dakwah sebagai metode utama dalam pembangunan spiritual masyarakat desa yang dilakukan dengan bentuk program pembinaan kepada masyarakat dalam wujud menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dakwah dalam pembangunan masyarakat merupakan sebuah langkah untuk memulai dan mendasari pembangunan kepada pribadi-pribadi yang memiliki puncak kesadaran (takwa).⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di katakan bahwa dakwah adalah risalah yang dibawa Rasulullah SAW dalam membangun umat manusia atau pengembangan masyarakat islam agar mencapai kehidupan sesuai dengan fitrahnya, yaitu hidup dijalan kebaikan dan kebenaran. Jadi, dakwah dalam proses membangun atau pengembangan masyarakat islam bukan hanya transmisi ajaran islam, melainkan proses transformasi dan internalisasi ajaran islam

⁸ Sri Indra Trigunarso, Ali Kabul Mahi, "*Perencanaan Pembangunan Daerah*", Depok:Kencana, 2017, hal:13

⁹Enjang As, "*Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah*", Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No.2 Edisi Juli-Desember 2011, hal:471

sebagai pandangan hidup (ideologi) dan yang kemudian melembaga pada lembaga kehidupan sehari-hari dalam siklus kehidupan masyarakat desa.¹⁰

Desa Karangtengah merupakan salah satu desa di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal yang telah melaksanakan proses mekanisme perencanaan pembangunan dengan teknik *top-down* dan *bottom-up*. Dimulai dari perencanaan dengan teknik *top-down* pada tahun 2014 dimana pemerintah desa hanya sebatas pembatasan ruang lingkup dalam kewenangan desa dan masyarakat hanya sebagai objek dalam pembangunan belum dijadikan sebagai subjek dalam proses pembangunan. Setelah diterbitkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa setiap perencanaan pembangunan baik dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan paling bawah yaitu desa harus melibatkan harus melibatkan semua unsur masyarakat. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang dan permen diatas, maka pemerintah Desa Karangtengah menyelenggarakan Perencanaan pembangunan dengan teknik *Bottom-up* dengan dimulai dari proses identifikasi masalah dan potensi dengan memaksimalkan usulan dari warga, selanjutnya penganggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, pelaksanaan (padat karya) dengan menambah sumber tenaga untuk proses pembangunan dari masyarakat lokal, serta pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD dan warga. Setelah dilaksanakannya mekanisme perencanaan tersebut dampak yang terjadi sangat signifikan kepada masyarakat diantaranya MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dapat berjalan dengan maksimal, proses pembangunan

¹⁰Enjang As, "Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah", Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No.2 Edisi Juli-Desember 2011, hal:479

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1

berjalan dan diprakarsai oleh masyarakat sendiri, rasa saling memiliki antar warga semakin meningkat dalam proses pembangunan.¹²

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Karangtengah didapati bahwa perencanaan *bottom-up* dapat menghasilkan dampak positif pada pembangunan. *Pertama*, pembangunan jalan dan rabat beton yang mulanya dikerjakan oleh pihak lain sekarang dikerjakan secara mandiri gotong-royong oleh warga sendiri secara bersama. *Kedua*, hasil dari program kelompok wanita tani(KWT) sangat meendukung dalam menunjang kesejahteraan warga dalam bidang ekonomi. *Ketiga*, secara keseluruhan masyarakat sudah mulai pro aktif dalam hal pembangunan karena proses perencanaan yang diterapkan adalah konsep *bottom-up*. *Keempat*, secara psikologis terjadi hubungan batiniah yang erat antara masyarakat dengan pemerintah desa dan pendamping sehingga memudahkan dalam proses pendekatan personal dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini diungkap oleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak Hanif salah satu perangkat desa Karangtengah yang bertanggung jawab di bidang kepala urusan keuangan.¹³

Berdasarkan fakta diatasmaka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”**.

¹²Wawancara dengan Bapak Mustahfid (Sekretaris Desa) di Kantor Desa Karangtengah, pada tanggal 29 Oktober 2019 Pukul:13.40 WIB

¹³Wawancara dengan Bapak Hanif (Kaur Keuangan) di Kantor Desa Karangtengah, pada tanggal 01 November 2019 pukul 14.10 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah peneliti ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Tahapan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana Hasil Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat di desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bersifat Teoritis dan Praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang memberikan kontribusi pada teori-teori. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang memberikan kontribusi secara aplikatif bagi program. Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi wacana terhadap pengembangan keilmuan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan sebagai bahan literatur untuk menambah wacana baru dalam keilmuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam bidang Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa. Diketahui bahwa berdasar pada teori pengembangan masyarakat melalui perencanaan partisipatif merupakan sebuah pilihan yang terbaik.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya jajaran Pemerintah Desa

Karangtengah serta menjadi bahan pertimbangan dalam bentuk ilmiah dan masyarakat Karangtengah dalam melihat dan menilai kinerja perencanaan partisipatif yang telah dilakukan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka perlu dipaparkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Abdul Hakim (2014) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang berjudul "*Implementasi Proses Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di desa Leppangeng kecamatan Belawa kabupaten Wajo*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Proses perencanaan partisipatif di desa Leppangeng, 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif di desa Leppangeng kecamatan Belawa kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses perencanaan partisipatif pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung dan perumusan tujuan yang sudah melibatkan masyarakat desa Leppangeng sedangkan tahap menetapkan langkah-langkah rinci dan merancang anggaran, masyarakat tidak disertakan karena tahap itu tetap juga akan diperbaiki pada saat pembuatan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang diputuskan oleh DPRD.¹⁴

Kedua, penelitian oleh Ariya Ulva (2017) Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Karangjaya Kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan*". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan

¹⁴Abdul Hakim, *Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2013, hal: 9.

pembangunan Desa pada khususnya di Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan dan faktor pendukung maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendasar dengan mengangkat data-data yang terdapat di Desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015 adalah rendah.¹⁵

Ketiga, penelitian oleh Bagas Tri Arlanda (2013) mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kotamadya Pasuruan Jawa Timur*". Penelitian ini dilakukan penulis dalam rangka mengidentifikasi kembali tingkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan partisipatif di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme perencanaan pembangunan, menentukan tingkatan partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kendala kurangnya partisipasi masyarakat, menentukan strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan kegiatan proses perencanaan pembangunan di kotamadya Pasuruan provinsi Jawa Timur.¹⁶

Keempat, penelitian oleh Nurul Hasanah (2017) mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara ekstensi fakultas ilmu sosial dan politik universitas sumatera utara yang berjudul "*Analisis Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif (studi kasus di desa Doiok Merawan)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimana implementasi perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan desa dan mengetahui bagaimana kelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Dolok Merawan. Jenis penelitian yang

¹⁵Ariya Ulva, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, hal: 2

¹⁶Bagas Tri Arlanda, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Madya Pasuruan*, Jember: Universitas Jember, 2013, hal: 8.

digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci sebanyak 7 responden dan informan tambahan sebanyak 20 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif sudah dipahami oleh masyarakat Desa Dolok Merawan. Masyarakat Desa Dolok Merawan telah menyadari bahwa pentingnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan, bukan hanya tangan pemerintahan desa saja, tetapi kebersamaan.¹⁷

Kelima, karya penelitian yang dibuat oleh Hj. Sitti Nur Fatimah (2016) Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang berjudul "*Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan di kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa.*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah masalah yang diteliti di kecamatan Tinggimoncong serta melakukan wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian terhadap perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa diketahui dengan menggunakan 3 pertimbangan yaitu pengumpulan informasi permasalahan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversivitas pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi permasalahan pembangunan dilihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan.¹⁸

Adapun perbedaan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat desa. Dalam penelitian ini akan di analisis lebih fokus kepada perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa bukan menganalisis terkait program atau proses dalam pembangunan desa.

¹⁷Nurul Hasanah, *Analisis Perencanaan Pembangunan Perdesaan yang Partisipatif (Studi Kasus Desa Dolok Merawan)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017, hal: 10

¹⁸Sitti Nur Fatimah, *Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hal: 9

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Selain itu penelitian kualitatif deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa bagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

2. Definisi Konseptual

Perencanaan Partisipatif adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh unsur dari elemen masyarakat hingga stakeholders untuk memilih alternatif terbaik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada guna mencapai tujuan tertentu.

Pembangunan Masyarakat Perdesaan adalah rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ini karena dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa karangtengah ini menurut penlitit dan sekretaris desa terdapat beberapa hal yang belum maksimal dalam proses perencanaan partisipatif sehingga pembangunan yang dilakukan kurang maksimal dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Oleh

karena itu, peneliti ingin melihat sebenarnya apakah proses perencanaan pembangunan tersebut telah berbasis partisipasi masyarakat.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.¹⁹

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

- a) Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.²⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
- b) Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengelolaannya.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan praktek perencanaan partisipatif di desa karangtengah sebagai acuan dan *literature* yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau dokumen dari Kantor Desa Karangtengah, serta karya tulis yang berhubungan dengan perencanaan partisipatif di lokasi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik (cara atau metode) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (test), dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang

¹⁹ Etta Mamang, Sopiah Sangaji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010, hal: 61

²⁰ Siswanto Sutojo, *Manajemen Bisnis di Perusahaan di Indonesia yang Efektif*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2012, Hal: 56.

²¹ Siswanto Sutojo, *Manajemen Bisnis di Perusahaan di Indonesia yang Efektif*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2012, Hal: 61

dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan penelitian.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a) Observasi yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa karangtengah melalui berbagai kondisi dan situasi nyata yang terjadi dalam tata cara penyusunan perencanaan partisipatif.
- b) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bernaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain.²³ yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yaitu Kepala Desa Karangtengah, Sekretaris Desa, beberapa tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat di Desa Karangtengah. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Aparatur Desa karangtengah

²²Riduwan, *Skala Pengukuran Variable-variable Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005, hal: 31.

²³Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktik.*, Malang: Bumi Aksara, 2013, hal: 45

- 2) Tokoh Masyarakat Desa Karangtengah
 - 3) Tokoh Wanita Desa Karangtengah
 - 4) Tokoh Pemuda Desa Karangtengah
 - 5) Masyarakat Umum Desa Karangtengah
- c) Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Tujuan teknik dokumentasi untuk mendapatkan suatu data gambaran tentang desa karangtengah secara kependudukan, geografis, dan data lainnya yang bisa didapatkan dengan menggunakan dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis tentang perencanaan partisipatif pembangunan di Desa Karangtengah dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab

²⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktik.*, Malang: Bumi Aksara, 2013, hal: 47

pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan peneliti menggunakan teori dari Miles and huberman langkah-langkah berikut:

25

- a) Reduksi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan penelitian di lapangan wawancara dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat untuk pengumpulan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan desa.
- b) Penyajian data. langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Pada tahap ini peneliti memaparkan kembali kepada mereka dalam wujud penyajian data untuk mengkonfirmasi data tersebut.
- c) Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.²⁶ Hasil dari data tersebut maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan memverifikasi data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan.

²⁵Haris Herdiansyah. *Metodologi Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika). 2012. h. 157-178

²⁶Siti Nurfattimah Rahman, “*Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hal:60

BAB II

PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

1. Implementasi Perencanaan Partisipatif

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.²⁷

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengartikan “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁸

Dikatakan oleh Wahab (dalam jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 2014: 35) bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means force carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Berdasarkan pandangan tersebut untuk mengimplementasikan berarti harus menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu agar menghasilkan dampak.²⁹

Proses implementasi merupakan pengejawantahan kebijakan atau aturan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai kualitas diri yang baik. Pengejawantahan aturan bisa dilakukan dengan cara menerapkan aturan

²⁷ <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses pada hari rabu 15 juli Pukul : 20.00 WIB

²⁸ Guntur, Setiawan. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004. Hal : 39

²⁹ Usman, Nurdin., *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Hal : 70

tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara rutin. Aturan yang dimaksud adalah norma secara umum dan juga agama.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Pengertian Perencanaan Partisipatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Perencanaan adalah sebuah proses yang menentukan keberhasilan suatu tindakan.³⁰

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Menurut Abe salah satu ahli menjelaskan bahwa Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat. Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.³¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka

³⁰ https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perencanaan+menurut+kbbi&hl=id&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiLi-uDyP3nAhUegUsFHQe2CjEQ_AUICSgA&biw=1366&bih=608&dpr=1

³¹ Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif Pembaharuan*, Yogyakarta, 2005, hal:11

memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.³²

c. Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif

Dalam upaya membuat sebuah kerangka perencanaan partisipatif perlu diperhatikan Ciri-ciri perencanaan partisipatif, sebagai berikut³³:

- 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
- 2) Partisipatoris (keterlibatan). Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
- 3) Dinamis. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
- 4) Sinergitas. Harus menjamin keterlibatan semua pihak, Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi, Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun, Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholder
- 5) Legalitas. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 6) Fisibilitas (Realistis). Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Adapun pendapat lain menyampaikan bahwa karakteristik dari perencanaan partisipatif adalah, sebagai berikut :³⁴

³² Agus Harto Wibowo, *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*, Universitas Diponegoro: Semarang, 2009, hal:73

³³ Agus Harto Wibowo, *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*, Universitas Diponegoro: Semarang, 2009, hal: 74-75

- 1) Mengarah ke pencapaian tujuan.
- 2) Mengarah ke perubahan.
- 3) Pernyataan pilihan tindakan.
- 4) Bertumpu pada rasionalitas.
- 5) Bertumpu pada tindakan kolektif

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa yaitu partisipatif (melibatkan masyarakat secara penuh), dikerjakan secara kolektif, terbuka dan mengaraha kepada tujuan atau perubahan akan suatu keadaan. Menurut penulis ada perbedaan diantara kedua teori tersebut yaitu pada aspek kepentingan masyarakat dan pengerjaan.

d. Proses dan Pendekatan dalam proses perencanaan Partisipatif Pembangunan Perdesaan

Proses perencanaan partisipatif pembangunan perdesaan dimulai dengan tahapan sebagai berikut³⁵ :

- 1) Pengumpulan data sekunder dari propinsi, dengan menggunakan informasi dari instansi teknis propinsi/kabupaten.
- 2) Penelaahan data sekunder dan sumber-sumber kepustakaan yang dilakukan dengan diskusi tim peneliti.
- 3) Perumusan masalah dan potensi sementara dengan metode teknik matriks masalah dan potens
- 4) Identifikasi kebutuhan data tambahan dan sumber data dengan diskusi tim peneliti.
- 5) Survei lapangan, dengan teknik menggunakan data sekunder dan informasi dari instansi teknis dan SSI dan FGD. Analisis situasi, dengan teknik pemetaan dan statistik.
- 6) Analisis masalah dan potensi, dengan sistem matriks interaksi masalah dan interaksi potensi dasar serta potensi turunan.

³⁴Mudradjad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, PT.Erlangga: Jakarta, 2004, hal: 75-76

³⁵Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal: 61-62

- 7) Perumusan tujuan perencanaan, dengan pengelompokkan tujuan dan reformasi masalah dan potensi menjadi tujuan.
- 8) Identifikasi dan formulasi program pembangunan alternatif dengan menggunakan matriks program pembangunan alternatif.
- 9) Analisis skenario dengan skenario quo dan skenario normatif.
- 10) Pernyataan kebijakan (*Policy Statement*) dengan mengoptimalkan data terkait masalah, isu, kendala, kebutuhan, potensi, prinsip dan sasaran.
- 11) Kerangka berpikir logis (Logical Framework) dengan merumuskan tujuan, indikator, cara memverifikasi, dan asumsi. Format program, dengan menjabarkan uraian program, tujuan, manfaat, kelompok, sasaran, waktu, dan instansi penanggung jawab.

Berdasarkan UU No.25/2005 tentang SPPN, dikenal empat pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu³⁶ :

1) Proses Politik

Pemilihan presiden atau kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh setiap calon presiden/kepala daerah.

2) Proses teknokratik

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/uni organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

3) Proses partisipatif

Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholders*) yaitu melalui pelaksanaan musrenbang.

Dari uraian diatas ada perbedaan sudut pandang dalam proses perencanaan partisipatif yaitu *pertama*, proses perencanaan menggunakan tahapan-tahapan yang merujuk dari masyarakat menuju pemerintah desa. *Kedua*, proses perencanaan menggunakan tahapan melalui sebuah proses

³⁶Sri Indra Trigunarso, Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Depok: Kencana, 2017, hal: 35

pendekatan. Menurut penulis dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan partisipatif pembangunan lebih baik di mulai dari dari bawah penggalian data ke masyarakat, memprioritaskan masalah, memutuskan program pembangunan, pengawasan, dan evaluasi.

e. Tahapan dan Indikator Perencanaan Partisipatif Pembangunan Perdesaan

Menurut Kuncoro ada 3 (tiga) dalam tahapan perencanaan partisipatif pembangunan desa, yaitu:³⁷

- 1) Pengumpulan data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
- 2) Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus dimana tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya.
- 3) Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan praktis.

Adapun pendapat lain yang menyatakan tahapan perencanaan pembangunan masyarakat ada 2 (dua), yaitu:³⁸

- 1) Perencanaan teknokratik atau *top-down*, adalah perencanaan yang dilakukan perencana profesional, atau oleh lembaga atau organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Perencanaan teknokratik atau *top down* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan dan pengolahan data , Problem seeking, Perumusan visi dan misi
 - b) Analisis, Pengkajian lingkungan eksternal
 - c) Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan ,Pengkajian lingkungan internal

³⁷Mudradjad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, PT.Erlangga: Jakarta, 2004, hal: 78-79

³⁸<https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html?m=1> diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 23.20 wib

- d) Pengembangan alternatif perencanaan, Perumusan isu-isu strategis
 - e) Evaluasi dan seleksi alternatif rencana, Penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran)
 - f) Penyusunan dokumen rencana, penyusunan rencana-rencana kerja (aksi/tindakan)
 - g) Monitoring dan Evaluasi Tindakan/Kegiatan
- 2) Perencanaan Partisipatif atau *Bottom-up*, adalah perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara penuh dari awal proses sampai akhir dari penyusunan perencanaan. Perencanaan partisipatif dilakukan dengan tahap yaitu, sebagai berikut :
1. Pembukaan Komunikasi Masyarakat Tujuannya untuk Menumbuhkan dan memupuk modal sosial, Mengubah suatu keadaan atau perilaku, motivasi dan komitmen melalui suatu proses pengembangan pemahaman secara partisipatif, Menciptakan suasana yang berprinsip dari, oleh dan untuk kita; Norma pembukaan komunikasi : Mengajak, mendorong bukan menginstruksikan, Meminta pendapat, mengusulkan bukan memutuskan, Menganalisis sesuatu secara partisipatif bukan memberikan penilaian, Memberikan kesempatan, memotivasi bukan melaksanakan sendiri.
 2. Penumbuhan kerjasama, artinya dalam menyusun perencanaan dibutuhkan semangat gotong-royong antar individu masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang diinginkan.
 3. Analisis Kebutuhan Masyarakat, artinya pemerintah desa dan masyarakat melakukan survey lapangan tentang keadaan lingkungannya dengan menggunakan skala prioritas untuk dijadikan bahan pertimbangan.
 4. Pengembangan partisipasi, dengan parameter partisipasi: siapa yang memunculkan ide dan gagasan?, siapa yang mengambil keputusan?, siapa yang menyusun rencana aksi?, siapa yang melaksanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinir kegiatan?, siapa yang menilai, mengevaluasi dan mengendalikan?.

5. Pengembangan masyarakat, dengan tahap Sosialisasi (formal maupun informal), Komunikasi pemahaman program, Perencanaan bersama (penentuan tujuan dan indikator, penentuan pihak yang berpartisipasi, penentuan sistem aplikasi dan koordinasi, penentuan sistem pengendalian), Pelaksanaan program bersama (pelaksanaan secara partisipatif. monitoring secara partisipatif, sistem kerja efektif dan terbuka/transparan)
6. Evaluasi bersama (pemahaman bersama kepada indikator dan pemahaman bersama pada kondisi program saat itu)
7. Simulasi Dinamika Kelompok dengan cara membangun keakraban, keterbukaan, saling membangkitkan motivasi, menguatkan kebersamaan.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu, *pertama*, penggalian data. *Kedua*, analisis data,. *Ketiga*, pengembangan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di desa. *Keempat*, evaluasi yang dilakukan secara kolektif pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan dan problematika, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Menurut UU No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa dalam membuat suatu konsep perencanaan pembangunan berdasarkan indikator sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat

dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material.

- c. Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa.
- d. Terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik Desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkannya semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah Desa maupun pada masyarakat.
- f. Selektif, semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- i. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu

memperbaikikalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.

- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik.
- k. Penggalan informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

f. Manfaat Perencanaan Partisipatif

Perencanaan secara partisipatif diperlukan karena memberi manfaat sekurang-kurangnya, yaitu³⁹:

- 1) Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasikan bidang-bidang/ sektor-sektor yang perlu perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
- 2) Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.
- 3) Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa perencanaan partisipatif dapat memberikan manfaat, sebagai berikut⁴⁰

- 1) Program dan kegiatan yang dirumuskan relative lebih aplikatif sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.
- 2) Adanya proses pemberdayaan masyarakat
- 3) Secara moral memillii tanggung jawab yang sama dalam program yang sudah di rumuskan.

³⁹Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal: 65

⁴⁰https://www.slideshare.net/stephanus_aan/perencanaan-partisipatif-42920965 diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 11.38 WIB

- 4) Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, karena di dalam proses penyusunannya melibatkan masyarakat secara penuh dan terbuka dalam setiap kegiatan yang akan direncanakan oleh pemerintah desa.

2. Pembangunan Masyarakat Desa

a. Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa

Masyarakat pedesaan atau desa, dua kata yang memiliki arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.⁴¹

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.⁴² Dapat dipahami bahwa kata “desa” sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴³

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada

⁴¹Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal:47.

⁴²Rustiadi dan Pranoto, *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*, Bogor: Crestpent Press, 2007, hal: 33.

⁴³Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.⁴⁴Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu upaya besar untuk mengawal implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa.

Pembangunan Masyarakat adalah suatu gerakan yang direncanakan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan partisipasi aktif dan kepercayaan sepenuh mungkin atas prakarsa masyarakat (PBB).Menurut Tr. Baten, pembangunan masyarakat (desa) adalah suatu proses dimana warga masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Menurut Irwin T. Sanders, pembangunan masyarakat (*Community Development*) adalah perpaduan atau persenyawaan dari dua bentuk kekuatan dalam masyarakat, kekuatan pertama adalah pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*) dan kekuatan yang kedua pengembangan ekonomi (*Economic Development*).⁴⁵

Berdasarkan Penjelasan diatas Pembangunan Masyarakat dapat diartikan upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah perdesaan.

b. Pembangunan Masyarakat Sebagai Kerangka Dakwah

Hakekatnya dakwah adalah bagian dari proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, lahir dan batin. Oleh karena itu dalam mewujudkan misinya dakwah tidak hanya menyampaikan pesan-pesan agama, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi objek sasaran dakwah. Masalah-masalah yang muncul dan dihadapi sekarang oleh masyarakat berkaitan

⁴⁴Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267

⁴⁵http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/197106141998031-JONI_RAHMAT_PRAMUDIA/Pembangunan_Masyarakat-HO.pdf, diakses pada hari Minggu, 12 Januari 2020, Pukul 01:44.WIB

dengan keagamaan, ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Setelah itu, diharapkan program dakwah masuk dalam proses dari pembangunan masyarakat dari titik awal yakni perencanaan pembangunan desa⁴⁶.

Seiring berjalannya waktu dalam implementasi perencanaan pembangunan di desa yang terjadi adalah bahwa program dakwah belum dikaitkan secara langsung dan menjadi gagasan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa dakwah hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan agama seperti caramah dalam pengajian warga, ceramah dalam shalat jum'at. Dalam setiap kegiatan di desa belum ada kajian atau pemahaman lebih lanjut terkait makna dan arti dakwah secara luas dalam aspek kehidupan masyarakat di desa.

Berdasarkan fakta diatas maka dari itu perlu adanya sebuah gagasan baru yang mengantarkan pemahaman masyarakat terhadap arti dan makna dakwah dalam konsep pembangunan masyarakat. Setelah melihat beberapa uraian diatas dapat ditarik sebuah konsep kerangka dakwah berbasis Pembangunan masyarakat yakni dengan mengkerjasamakan program dakwah yang sudah matang dalam serangkaian pembangunan desa dan memaksimalkan peran dakwah atau lembaga-lembaga dakwah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dengan berorientasi dakwah adalah sebuah pembebasan, pemberadaban dan penyelamatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Peran dakwah atau lembaga-lembaga dakwah sebagai nyawa dalam proses pembangunan masyarakat harus masuk secara mendalam ke dalam aspek kehidupan masyarakat, meliputi⁴⁷:

- 1) Bidang Ekonomi dapat dilakukan dengan upaya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan ketrampilan masyarakat untuk mengembangkan usaha.

⁴⁶ Prof. Soetandyo Wingnyosoebroto, MPA. *“Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi”*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hal:50

⁴⁷ Agus Riyadi, *“Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam”*, Jurnal ANNIDA, Vol.6 No.2 2014, hal:116

- 2) Bidang Pendidikan berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik melalui pendidikan formal, informal dan nonformal.
- 3) Bidang Kesejahteraan dan kesehatan berorientasi pada meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sehingga menumbuhkan generasi muda yang kuat dan siap berkompetisi dan mampu menjawab perkembangan zaman.
- 4) Bidang Keagamaan berorientasi pada peningkatan spiritual dan pembinaan secara moral, perilaku, akhlak masyarakat menuju "*amar ma'ruf nahi munkar*".
- 5) Bidang Sosial Masyarakat berorientasi menumbuhkan jiwa persatuan dan kesatuan serta rasa memiliki (*sense of belonging*) dalam upaya pembangunan masyarakat desa yang dikerjakan secara kolektif atas dasar kebutuhan bersama.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan masyarakat adalah salah satu strategi dakwah, karena hakekatnya dalam proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam aspek apapun. Terbukti dengan adanya sebuah proses pembangunan masyarakat lebih aktif dalam kegiatan sosial, rasa saling memiliki satu sama lain semakin erat, dan rasa perhatian satu sama lain antar individu masyarakat semakin baik.

c. Asas dan Prinsip Pembangunan Masyarakat

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan asas dan

prinsip khusus untuk Pembangunan masyarakat desa. Diantaranya tiga asas pembangunan masyarakat perdesaan, yaitu⁴⁸ :

- 1) Pembangunan integral (dilakukan secara seimbang) adalah pembangunan yang seimbang dilihat dari semua segi masyarakat desa yang meliputi sektor-sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya, sehingga menjamin pembangunan yang selaras, seimbang dan tidak berat sebelah.
- 2) Kekuatan sendiri adalah tiap usaha harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, artinya tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.
- 3) Pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan pada bidang atau sektor yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat desa yang bersangkutan.

Adapun 3 (Tiga) prinsip pokok pembangunan masyarakat desa, yaitu⁴⁹ :

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan masyarakat bisa dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi.

75

⁴⁸Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal: 73-

75

⁴⁹Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal: 74-

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pembangunan masyarakat harus ada prinsip yang melekat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebijaksanaan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Strategi Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat desa merupakan perwujudan program nawacita Pemerintah Presiden Joko Widodo. Program ini dibangun dalam rangka mendukung secara penuh bahwa pembangunan nasional dimulai dari desa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembangunan masyarakat dan desa, yaitu⁵⁰:

- 1) Pembangunan agraria yang menjadi landasan utama pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.
- 2) Pembangunan yang dilakukan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang berdasar pada prinsip keadilan dan keselamatan kawasan desa itu sendiri.
- 3) Adanya ransormasi yang terjadi pada perekonomian desa dengan adanya lumbung ekonomi desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat hingga membangun kualitas demokrasi desa untuk melahirkan sebuah kepemimpinan muda di tingkat.
- 5) Membangun desa inklusi yang melibatkan partisipasi masyarakat miskin, difabel, dan kelompok marjinal.
- 6) Konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan amanat undang-undang desa.
- 7) Pembangunan desa yang memungkinkan akses lebih luas untuk para perempuan desa terhadap sumberdaya.
- 8) Pelayanan publik yang dilaksanakan setiap desa secara profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 9) Pemerintah harus berkomitmen penuh dalam penyediaan sistem informasi dan teknoogi yang merata dan juga adil.

⁵⁰ <http://www.sosdea.id/detail/132/kemdes-ini-9-strategi-membangun-desa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 hari jum'at pukul 02.10 WIB

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pembangunan manusia adalah dengan proses dari masyarakat itu sendiri, dilakukan dengan semangat gotong-royong, memberdayakan masyarakat dan berkelanjutan.

e. Tujuan Pembangunan Masyarakat Perdesaan

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa, yaitu⁵¹ :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia.
- 2) Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Sutaryat tujuan pembangunan masyarakat ada 4 (empat) yaitu, sebagai berikut⁵² :

- 1) Menjadikan masyarakat yang membangun.
- 2) Masyarakat yang mandiri
- 3) Masyarakat yang kooperatif
- 4) Masyarakat partisipatif

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakekat dalam tujuan pembangunan masyarakat adalah menjadikan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, menjadikan masyarakat yang mandiri, dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat.

⁵¹<http://www.Keuangedesa.com/serial-panduan-pembangunan-desa-buku-1/8>, diakses pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, pukul 06:54 WIB.

⁵²Sutaryat, T. *Perubahan Sikap dan perubahan Sosial Dalam Konteks pembangunan dan Modernisasi*, Bandung:IKIP Bandung. 1984, hal: 12

BAB III
IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

A. Porfil Desa Karangtengah

1. Sejarah Singkat Desa Karangtengah

Karangtengah berasal dari kata “karang” merupakan kata yang sering digunakan dan mempunyai banyak pemaknaan. Berdasarkan bahasa Jawa kuno, “karang” berasal dari kata “kara” yang memiliki arti batuan yang ada di laut, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pemaknaan tentang kata “karang”. Pertama, “karang” yang dimaknai sebagai pekarangan atau tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal. Kedua, “karang” yang dimaknai sebagai tempat untuk berkumpul. Pemaknaan “karang” berdasarkan bahasa Jawa kuno dapat diabaikan, karena letak Desa Karang Tengah cukup jauh dari laut.

Menurut pemaknaan dalam bahasa Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa “karang” yang dimaksud disini adalah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal dan berkumpul, mengingat desa Karangtengah dulunya adalah wilayah yang masih kosong dan banyak ditumbuhi pohon. Kata “tengah” dalam bahasa Indonesia memiliki arti berada di tengah-tengah. Jika dikombinasikan, “Karang” dan “Tengah” berarti tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal dan berkumpul yang berada di tengah-tengah. Versi lain menyebutkan jika karang berasal dari kata “carang” yang berarti daun yang masih muda, Jika dikombinasikan maka “Carang Tengah” berarti daun yang masih muda dan berada di tengah-tengah. Hal ini berkesinambungan dengan awal mula Desa Karangtengah di mana masih banyak ditumbuhi pohon dan masih sedikit ditinggali warga (daerah yang masih sepi/muda).⁵³

⁵³<http://karangtengah.sideka.id/sejarah/> diakses pada hari kamis tanggal 11 Maret 2020 pukul 11.58 WIB

2. Letak Geografis Desa

Desa Karangtengah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Desa ini terletak sebelah timur dari ibukota Kabupaten Kendal. Jarak dari kota Kendal ke Desa karangtengah adalah 7 km. Secara geografis desa Karangtengah terletak di:

Luas wilayah	: 949 Ha
keliling desa seluas	: 16 km
Topografi	: dataran rendah
Ketinggian	: 4,5 meter
Curah hujan rata-rata	: 163 mm/bulan
Suhu udara rata-rata	: 28°/hari

Secara administrasi desa karangtengah berbatasab dengan wilayah utara desa mororejo, wilayah barat desa



Gambar 1 : Peta wilayah Desa Karangtengah 2019

3. Jumlah Penduduk Desa Karangtengah 2020

1. Jumlah Penduduk Desa Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
3.185	1.593	1.592

Sumber : *Dokumen Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Karangtengah Maret 2020*

Jumlah penduduk desa Karangtengah sebanyak 3.186 Jiwa yang terdiri dari 1.593 laki-laki dan 1.592 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 814 KK. Sedangkan jumlah Keluarga yang cerai hidup 51 KK dan cerai mati 129 KK. Dalam penelitian perencanaan partisipatif pembangunan perdesaan di desa karangtengah kecamatan kaliwungu, peneliti mengambil sampel pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, ketua RT 01/RW 01, RT 04/RW 01, RT 01/ RW 02, RT 02/RW02, RT 03/RW 02, RT 02/RW 03, RT 04/RW 02, RT 03/RW 01 yang ditetapkan oleh Sekretaris desa selaku perwakilan dari kepala desa.

2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Karangtengah

Beberapa data yang diperoleh peneliti dalam observasi tentang jenis mata pencaharian ditinjau dari penduduk menurut jenis pencaharian, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Karangtengah 2020

No.	Mata pencaharian penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	404	410	814
2.	Mengurus rumah tangga	0	399	399
3.	Pensiunan	14	5	19
4.	PNS	23	17	40
5.	TNI	7	0	7
6.	POLRI	4	0	4
7.	Perdagangan	18	37	55
8.	Petani/Pekebun	49	23	72
9.	Nelayan/Perikanan	1	0	1
10.	Karyawan swasta	272	154	426
11.	Karyawan BUMN	2	0	2

12.	Karyawan BUMD	1	0	1
13.	Karyawan Honorer	3	2	5
14.	Buruh Harian Lepas	101	46	147
15.	Buruh Tani/Perkebunan	2	0	2
16.	Tukang Las/Pandai Besi	1	0	1
17.	Dosen	2	1	3
18.	Guru	11	24	35
19.	Notaris	1	0	1
20.	Dokter	1	2	3
21.	Bidan	0	4	4
22.	Perawat	2	8	10
23.	Pelaut	2	0	2
24.	Sopir	8	0	8
25.	Pedagang	2	0	2
26.	Perangkat Desa	4	1	5
27.	Wiraswasta	383	219	602
Jumlah Total		1.693	1.592	3.185

Sumber Data : *Dokumen Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Karangengah Maret 2020*

Dari tabel 2. diatas mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa karangengah mayoritas wiraswasta yang berjumlah 602 orang, dan urutan kedua yaitu karyawan swasta yang berjumlah 426 orang, dan yang terakhir yaitu mengurus rumah tangga dengan jumlah 399 orang.

Aktivitas masyarakat wiraswasta desa karangengah sehari-harinya bekerja dalam bidang pengelolaan produk dan berdagang dari pagi jam 07.00 WIB dan pulang hingga sore hari pukul 16,00 WIB, terkadang juga mereka pulang larut hingga malam ketika ada jam lemburan. Bagi wiraswasta dan karyawan swasta dari penghasilan mereka setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan ibu rumah tangga hanya sekedar mengurus urusan di rumah dan menunggu hasil dari para kepala keluarga yang bekerja di bidang wiraswasta.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

Beberapa data yang diperoleh peneliti dalam observasi tentang pendidikan akhir ditinjau dari jumlah penduduk, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3 : Jumlah Penduduk menurut pendidikan akhir Desa Karangtengah 2020

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	822
2.	Belum tamat SD/Sederajat	229
3.	Tamat SD/Sederajat	623
4.	SLTP/Sederajat	478
5.	SLTA/Sederajat	774
6.	DIPLOMA I/II	10
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	63
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	175
9.	STRATA II	10
10.	STRATA III	1
Jumlah Total		3.185

Sumber data : *Dokumen Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Desa karangtengah 2020*

Dari tabel 3 diatas pendidikan akhir masyarakat di Desa karangtengah sebagian besar tamat SLTA yang berjumlah 774 orang, dan urutan kedua tamat SD yang berjumlah 625, dan yang terakhir tamat SLTP yang berjumlah 478 orang.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Beberapa data yang diperoleh peneliti dalam observasi tentang agama ditinjau dari jumlah penduduk, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4 : Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Islam	3.162
2.	Kristen	4
3.	Katholik	19
Jumlah Total		3.185

Sumber data : *Dokumen statistik penduduk berdasarkan agama desa Karangtengah 2020*

Dari tabel 4 diatas masyarakat Desa Karangtengah mayoritas memeluk agama islam yang berjumlah 3.162 orang, dan minoritas

masyarakat yang memeluk agama Kristen dan katolik berjumlah 23 orang.

4. Visi dan Misi

Dalam mewujudkan cita-cita desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan visi dan misi Desa Karangtengah sebagai berikut:⁵⁴

a. Visi Desa

“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri dan berdayaguna menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karangtengah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Karangtengah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa

- 1) Menjalankan sistem Pemerintahan Desa yang profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memperkuat modal sosial masyarakat seperti budaya bermusyawarah dan gotong royong dalam pembangunan.
- 3) Mendorong program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun pola pikir, meningkatkan ketrampilan (sumber daya manusia) dan bersikap yang lebih konstruktif dan produktif sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.
- 4) Pembangunan infrastruktur untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar (rumah layak, air bersih,

⁵⁴Dokumen yang diperoleh dari Sekretaris Desa Bapak Mustahfid dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 pukul:11.00 WIB di kantor Desa Karangtengah

- sanitasi, fasilitas kesehatan) dan penataan lingkungan pemukiman sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
- 5) Memperkuat kelembagaan Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Desa
 - 6) Memperkuat lembaga keswadayaan masyarakat baik dibidang kepemudaan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tangga melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan dan jaringan pemasaran yang lebih baik.
 - 7) Mendorong pengembangan kegiatan keagamaan untuk memperkuat identitas dan jatidiri masyarakat.
 - 8) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan

5. Struktur Organisasi Desa Karangtengah

Dalam struktur organisasi Desa Karangtengah kecamatan kaliwungu dibagi menjadi dua bagan yaitu struktur Pemerintah Desa dan struktur BPD Desa, dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal



Gambar 2: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

⁵⁵Dokumen yang diperoleh dari Sekretaris Desa Bapak Mustahfid dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 pukul:11.00 WIB di kantor Desa Karangtengah

b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal



Gambar 3: Struktur BPD Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

6. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desanya membagi beberapa jajaran atau devisi dalam bidangnya yaitu, sebagai berikut :⁵⁶

a. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

⁵⁶Dokumen yang diperoleh dari Sekretaris Desa Bapak Mustahfid dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 di kantor Desa Karangtengah

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya untuk menunjang kualitas pembangunan desa
- f) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

b. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat sdesa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Mengkoordinir fungsi administratif dalam aspek pembangunan dari perencanaan sampai proses laporan pertanggungjawaban.

c. Kaur Tata Usaha dan Umum

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f) Penyiapan rapat-rapat;
 - g) Pengadministrasian aset desa;
 - h) Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i) Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j) Melaksanakan pelayanan umum;
 - k) Membantu sekretaris desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa baik secara administratif maupun teknis

d. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi
 - a) Pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - b) Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa;
 - c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;
 - d) Melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - e) Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;
 - f) Melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - g) Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - h) Membantu sekretaris desa secara administratif keuangan dalam pembangunan desa

e. Kepala Urusan Perencanaan

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b) Menyusun RAPBDes;
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;

- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g) Membantu sekretaris desa secara administratif dalam perencanaan pembangunan desa sampai laporan pertanggungjawaban
- f. Kepala Seksi Pemerintahan
- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
 - 2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Kasi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa.
 - b) Menyusun rancangan regulasi desa.
 - c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
 - d) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
 - g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
 - h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa.
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan
- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
 - b) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
 - c) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

- d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.
 - e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
 - f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
 - g) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.
 - h) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.
 - i) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna.
- h. Kepala Seksi Pelayanan
- 1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan.
 - 2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
 - b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
 - c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;
 - e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.

i. Kepala Dusun

- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas, meliputi :⁵⁷
 - 1) Melaksanakan pemilihan kepala desa
 - 2) Meminta pertanggungjawaban kepala desa atas nama rakyat pada akhir tahun anggaran
 - 3) Menyalurkan aspirasi rakyat kepada instansi yang berwenang
 - 4) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembinaan perekonomian desa
 - 5) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembangunan desa
 - 6) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka ketertiban dan ketentraman desa
 - 7) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan masyarakat

⁵⁷Sayumitra andi, 2009. Implementasi perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan di desa lapang kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat, Universitas sumatera Utara, Hal : 61-63

- 8) Melaksanakan pengawasan kerja sama antar desa
 - 9) Bekerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan dalam memberantas narkoba, perjudian, penjualan anak, HAM dan kriminalitas
- b. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, meliputi :⁵⁸
- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 - 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban, meliputi:⁵⁹
- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
 - 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
 - 4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
 - 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa

B. Tahapan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat

Undang-undang Desa telah menjelaskan secara jelas bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa

⁵⁸ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

⁵⁹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 63

snediri harus melalui beberapa tahap dan berdasarkan indikator agar dalam penyusunannya berjalan dengan baik dan terukur. Desa karangtengah seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dalam pola perencanaan pembangunan dari tahun 2000an hingga sekarang era Undang-Undang Desa, Desa karangtengah menggunakan pola perencanaannya *bottom-up* (partisipatif) dengan proses melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja sama dalam pembangunan.⁶⁰

Sesuai dengan paradigma pembangunan yang baru, perencanaan bersama masyarakat menjadi kebutuhan yang mendasar dalam rangka proses pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan tersebut sebagai perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yaitu melibatkan unsur pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kepentingan publik agar dokumen perencanaan tersebut menghasilkan program yang tepat sasaran dan lebih berhasil. Pada tahun 2018 Desa Karangtengah telah menerapkan pola perencanaan partisipatif sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh elemen unsur masyarakat guna untuk menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan mereka melalui tahapan sebagai berikut :⁶¹

1) Tahap Persiapan

Tahap Persiapan dilakukan dengan tahap:

- a) Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat membentuk tim penyusun RPJM Desa
- b) Tim penyusun Musrenbang RPJM Desa terdiri dari: KADES, Ketua BPD beserta anggota, SEKDES, KAUR, LPM, KADUS, pendamping desa dan tokoh masyarakat
- c) Tim penyusun Musrenbang melakukan penjaringan masalah secara partisipatif di setiap dusun

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Mulyono di Kantor BPD Kaarantengah pada tanggal 15 juni 2020 pukul 14:00 WIB

⁶¹Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

2) Sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat

Sosialisasi sangat penting dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai tujuan program yang dicanangkan dalam pembangunan infrastruktur. Bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain:

- a) Kepala desa bersosialisasi dahulu kepada struktur organisasi pemerintah desa.
- b) Sekretaris desa mengeluarkan surat edaran rapat untuk kepala dusun terkait akan dilaksanakan Musrenbang

3) Musyawarah Dusun

Berikut tahap-tahap dalam pelaksanaan musyawarah dusun:

- a) Forum musyawarah dusun dilakukan di setiap rumah kepala dusun.
- b) Kepala Dusun bersama masyarakat membahas tentang masalah yang ada di daerah dusun tersebut.
- c) Setelah menemukan masalah di dusun, semua Kepala Dusun melaporkan hal tersebut pada saat musyawarah desa akan dilaksanakan.



Gambar 4. Musyawarah Dusun di RW 03

Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa dalam proses musyawarah dusun sebelumnya ada undangan terlebih dahulu dari RW ke masyarakat. dalam forum tersebut dibahas tentang potensi dan masalah yang sedang

dihadapi oleh masyarakat dengan dipimpin oleh Bapak Samiyo. Hal ini dimaksudkan untuk menskala prioritas

4) Musyawarah Desa

Musyawarah desa dilakukan untuk mengetahui laporan dari Kepala Dusun terkait masalah yang ada di setiap dusun. Adapun tahap dalam musyawarah desa yaitu :

- a) Pemerintah desa melakukan rekapitulasi hasil pengkajian keadaan dusun sesuai dengan program yang diprioritaskan
- b) Aparatur pemerintah desa mendahulukan pembangunan infrastruktur bagi dusun yang sangat memerlukan pembangunan infrastruk.



Gambar 5. Musyawarah Desa

5) Murenbang Desa (RPJMDesa)

Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Terdapat empat bidang kegiatan yaitu: bidang pemerintahan desa, bidang infrastruktur, bidang pembinaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat. Musyawarah ini dititik fokuskan untuk memustuskan kegiatan masarakat untuk merealisasikan pembangunan untuk mensejahterakan hidup masyarakat terlebih yang menjadi titik tekan adalah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang kehidupan masing-masing.

Dalam menyusun perencanaan partisipatif Desa Karangtengah melakukannya dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dalam wawancara peneliti dengan Bapak Mustahfid, beliau menjelaskan bahwa :

“iya mas dalam menyusun perencanaan pembangunan kami menggunakan metode PRA, dengan cara rebug warga atau musyawarah per RY atau RW. Hal ini dimaksudkan untuk menggali [permasalahan yang ada di masyarakat dengan membuka forum terbuka dan diskusi bersama masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk pembangunan d desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya merencanakan pembangunan, dari pemerintah desa menganjurkan untuk mengadakan musyawarah per RT atau RW dengan menggunakan metode PRA dengan cara FGD (*Focus Group Discussion*) di setiap kelompok masyarakat. Hal ini bertujuan unruk menggali dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan belajar secara bersama untuk menemukan solusi dalam pembangunan desa.



Gambar 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Karangtengah

Adapun cara atau meode dalam melaksanakan tahapan perencanaan partisipatif di Desa Karantengah dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yaitu dengan proses belajar bersama masyarakat dengan membentuk forum diskusi di tingkat RT atau RW atau biasa disebut dengan FGD (*Focus Group Discussion*). Cara ini digunakan untuk menggali data tentang masalah dan kebutuhan

masyarakat dengan menghadirkan warga, tokoh masyarakat, dan ketua RT/RW setempat. Upaya ini dilakukan pemerintah desa untuk membuka ruang sepenuhnya kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan atau aspirasinya tentang kebutuhan pembangunan. Dengan demikian masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif tidak hanya sebatas menyampaikan ide atau gagasannya, namun masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk ikut dalam proses dan mengawal jalannya pembangunan sampai akhir.

C. Hasil Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis partisipatif agar berjalan dengan maksimal, maka perlu adanya beberapa indikator untuk mengukur dan mengetahui apakah pola yang diterapkan oleh desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desanya sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini penulis merangkum beberapa hasil dari perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang terjadi di Desa Karangtengah, sebagai berikut :

a) Mengatasi/ membantu menyelesaikan masalah

Dalam wawancara peneliti dengan Pak Sekdes beliau menyampaikan bahwa

Pak sekdes : bisa mengatasi karena dasarnya usulan dari lingkungan masyarakat sendiri apabila disampaikan secara matang pasti bisa diatasi usulannya. Namun desa belum punya pola kajian yang matang untuk mewadahi usulan dari masyarakat.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris BPD Bu Parmi bahwa:

“Ibu Parmi (salah satu anggota BPD) : sangat membantu terlebih dalam kaum perempuan dulu kelompok pkk kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah desa sekarang sudah selangkah lebih maju dan berjalan secara optimal, bahkan sempat mendapatkan juara 1 tingkat provinsi dalam pengolaan UMKM. Dalam forum pun tidak ada bentuk diskriminasi kepada kaum perempuan.”

b) Berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Dalam wawancara peneliti dengan Pak Sekdes di kantor desa beliau menyampaikan bahwa :

“Pak sekdes : iya kalau saya lihat secara langsung sudah memenuhi kebutuhan masyarakat mas, dimana sekarang yang jadi fokus prioritas pembangunan desa dibidang lingkungan dan infrastuktur dan itupun berdasarkan usulan dari masyarakat sendiri dan alhamdulillah sudah terealisasi.”

c) Memperhatikan aspirasi masyarakat

Dalam wawancara peneliti dengan Sekretaris BPD bu parmi di kantor desa beliau menyampaikan bahwa :

“Bu parmi : iya mas seperti yang saya bilang bahwa disini dalam menyampaikan aspirasi tidak ada bentuk diskriminasi apapun kepada kaum perempuan”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Sekdes dalam wawancara peneliti bahwa :

“Pak sekdes : benar mas semua usulan 100 persen murni dari usulan masyarakat sendiri”.

d) Meningkatkan motivasi kelompok masyarakat

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua BPD Bapak Mulyono menyatakan bahwa :

“Semenjak adanya Undang-Undang Desa ini yang menuntut desa untuk transparan akhirnya masyarakat tau dan sadar untuk tergugah ikut partisipasi serta menyampaikan segala kebutuhannya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Sekdes dalam wawancara peneliti bahwa:

“Pak sekdes : dengan diselenggarakannya musyawarah oleh tingkat RT ataupun RW sudah menunjukkan peningkatan kesadaran dalam diri masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan. Setelah itu, kami proses untuk disiapkan dalam musyawarah desa ”

e) Menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua BPD Bapak Mulyono menyatakan bahwa:

“Pak sekdes : iya mas dalam hal ini perwakilan dari masyarakat terkhusus RT dan jajarannya kita kasih tanggung jawab dalam bentuk kegiatan pembangunan seperti yang baru saja jadi yaitu renovasi jalan desa hingga sekarang masyarakat sekitar secara mandiri masih menjaga dengan baik dengan membersihkan kotoran disekitar jalan secara bersama.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak RW 03 Bapak Samiyo :

“Setelah adanya pembangunan khususnya penataan jalan mas, kami secara tingkat rw berkomitmen untuk merawat dan menjaganya. Setiap seminggu sekali seperti gotong royong membersihkan SPAL dan ngecor jalan yang berlubang”.

f) Berlangsung secara berkelanjutan

Dalam wawancara peneliti di lapangan dengan Pak Sekdes beliau menyatakan bahwa :

“Pak sekdes : sudah mulai sejak 2018 mas pola perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara penuh dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan secara continue dan mulai mengembangkan pola yang efektif untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk desa.”

g) Meningkatkan proaktif masyarakat

Dalam wawancara peneliti bersama Ketua BPD Bapak Mulyono di kantor BPD beliau menyampaikan bahwa :

“Pak Mulyono : setelah adanya Musrenbangdes masyarakat lebih tergugah mas untuk menyampaikannya aspirasinya banyak sekali, sampai kami saat ini masih ada yang belum kami realisasikan karena banyak keinginan dan kebutuhan masyarakat. adapun untuk mengatasi hal ini kami menggunakan skala prioritas untuk mengukur mana dulu yang harus segera diatasi.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Sekdes dalam wawancara peneliti di kantor desa :

“Pak sekdes : jelas ini sudah terjadi di desa kami mas karena setelah diberlakukannya pola perencanaan partisipatif dari desa sudah mulai terbuka dan transparan dari segi anggaran, masukan dan saat ini desa sedang memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih utama dengan itu masyarakat sudah mulai sadar sehingga satu persatu sudah berani menyampaikan segala aspirasinya untuk pembangunan desa.”

h) Menjamin keterlibatan semua pihak dari seluruh elemen masyarakat

Dalam wawancara peneliti dengan Sekretaris BPD di rumah bu parmi menyatakan bahwa :

“Kalau mengenai pelibatan dalam musyawarah pembangunan itu sudah mas, cuma yang saya amati ternyata dari pemuda karangtaruna memang belum sepenuhnya aktif karena kesibukan dan waktu yang tepat.?”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Sekdes beiau menyampaikan bahwa :

“Dari desa sudah berusaha secara maksimal untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dari LPMD, LKMD, PKK, Karangtaruna, RW, RT, dan tokoh masyarakat serta masyarakat secara umum. Namun dalam realitanya masih ada yang belum ikut serta yaitu dari pemuda karangtaruna dikarenakan kebanyakan pemuda adalah pekerja pabrik dan terkendala antara waktu dan jarak belum aktif secara penuh, lalu dari LPMD yang belum aktif secara ideal.”

i) Menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat

Dalam wawancara peneliti dengan pak sekdes pada musyawarah tingkat RT sampai ke MUSRENBNGDES beliau menyampaikan bahwa :

“Pak sekdes : dalam menyampaikan aspirasi dalam musyawarah di tingkat desa, dusun maupun di desa berjalan dengan baik dan kondusif tetap saling menghormati anantara golongan tua dan golongan muda. Namun ada sisi lain di satu pihak ada yang masih berprinsip bahwa yang kuat argumennya dialah yang menang itu bisa terjadi karena masih terbawa budaya zaman dahulu.”

BAB IV

ANALISIS TAHAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KARANGTENGAH

Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian dan mendiskusikannya secara mendalam. Bagian pertama akan menganalisis tahapan proses perencanaan partisipatif pembangunan desa, bagian selanjutnya yaitu menganalisis mengenai indikator dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa. Perencanaan partisipatif menurut Abe adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat. Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.⁶²

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki. Tahapan penyusunan perencanaan partisipatif merupakan salah satu maksud dari undang-undang desa yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat berdasarkan hak asal usulnya. Maka segala kebutuhan tentang pembangunan di arahkan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan, hal ini bertujuan agar pembangunan yang direalisasikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat juga pemerintah desa terlebih harus menjadi satu kesatuan bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan untuk desanya. Sesuai dengan penelitian ini yaitu untuk melihat apakah perencanaan partisipatif

⁶²Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif Pembaharuan*, Yogyakarta, 2005, hal:11

dalam proses tahapan perencanaan pembangunanterlaksana dengan baik atau tidak dari aspek proses tahapan dan indikator dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa.

Adapun bagian yang menunjukkan bagaimana perencanaan berbasis *bottom-up* partisipatif pembangunan desa berdasarkan analisis yaitu tahapan-tahapan dan hasil perencanaan berdasarkan indikator perencanaan pembangunan desa yang baik.

A. Analisis Tahapan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Undang-undang No. 6 tahun 2014 telah menjelaskan secara jelas bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sendiri harus melalui beberapa tahap dan berdasarkan indikator agar dalam penyusunannya berjalan dengan baik dan terukur.

Perencanaan Partisipatif atau *Bottom-up*, adalah perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara penuh dari awal proses sampai akhir dari penyusunan perencanaan. Perencanaan partisipatif dilakukan dengan tahap yaitu, sebagai berikut :

1. Pembukaan Komunikasi Masyarakat Tujuannya untuk Menumbuhkan dan memupuk modal sosial, Mengubah suatu keadaan atau perilaku, motivasi dan komitmen melalui suatu proses pengembangan pemahaman secara partisipatif, Menciptakan suasana yang berprinsip dari, oleh dan untuk kita; Norma pembukaan komunikasi : Mengajak, mendorong bukan menginstruksikan, Meminta pendapat, mengusulkan bukan memutuskan, Menganalisis sesuatu secara partisipatif bukan memberikan penilaian, Memberikan kesempatan, memotivasi bukan melaksanakan sendiri.

2. Penumbuhan kerjasama, artinya dalam menyusun perencanaan dibutuhkan semangat gotong-royong antar individu masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang diinginkan.
3. Analisis Kebutuhan Masyarakat, artinya pemerintah desa dan masyarakat melakukan survey lapangan tentang keadaan lingkungannya dengan menggunakan skala prioritas untuk dijadikan bahan pertimbangan.
4. Pengembangan partisipasi, dengan parameter partisipasi: siapa yang memunculkan ide dan gagasan?, siapa yang mengambil keputusan?, siapa yang menyusun rencana aksi?, siapa yang melaksanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinir kegiatan?, siapa yang menilai, mengevaluasi dan mengendalikan?.
5. Pengembangan masyarakat, dengan tahap Sosialisasi (formal maupun informal), Komunikasi pemahaman program, Perencanaan bersama (penentuan tujuan dan indikator, penentuan pihak yang berpartisipasi, penentuan sistem aplikasi dan koordinasi, penentuan sistem pengendalian), Pelaksanaan program bersama (pelaksanaan secara partisipatif. monitoring secara partisipatif, sistem kerja efektif dan terbuka/transparan)
6. Evaluasi bersama (pemahaman bersama kepada indikator dan pemahaman bersama pada kondisi program saat itu)
7. Simulasi Dinamika Kelompok dengan cara membangun keakraban, keterbukaan, saling membangkitkan motivasi, menguatkan kebersamaan.

Pada tahun 2018 Desa Karangtengah sudah memulai menerapkan pola perencanaan partisipatif sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh elemen unsur masyarakat guna untuk menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan mereka melalui tahapan yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyusun. Perencanaan Pembangunan

Desa karangtengah dalam membentuk tim ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas penyusunan perencanaan pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, tidak saling tumpang tindih dan bisa terakomodir secara baik. Dalam tahap ini menurut penulis belum disampaikan dalam teorinya mardikanto di Bab II yang menyatakan bahwa tahap pertama dalam menyusun perencanaan partisipatif adalah pembukaan komunikasi kepada masyarakat. hal ini belum jelas menurut penulis karena melakukan pembukaan komunikasi kepada masyarakat harus berasal dari siapa, melalui media apa dan siapa yang melakukan. Makanya perlu kiranya membentuk tim penyusun di masukkan dalam tahap awal sebelum merencanakan pembangunan desa.

2. Melakukan sosialisai kepada masyarakat

Pada tahap ini desa karangtengah melalui sekretaris desa selaku ketua dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa menginstruksikan kepada koordinator setiap RW/RT untuk menyelenggarakan kumpul rembug bersama masyarakat. hal ini ditujukan untuk menyampaikan informasi dan rembug bersama masyarakat untuk membahas kebutuhan terkait pembangunan. Langkah ini sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam tahapan perencanaan partisipatif menurut Mardikanto yaitu analisis kebutuhan masyarakat, menumbuhkan kerjasama, pembukaan komunikasi kepada masyarakat, dan pengembangan partisipasi. Menurut penulis setelah ditemui hasil dilapangan bahwa rembug RT sudah berjaan dengan rutin seminggu sekali dilaksanakan dan tingkat partisipasi keaktifan masyarakat sudah meningkat semenjak adanya Undang-Undang Desa diberlakukan.

3. Menyelenggarakan Musyawarah Dusun

Musyawarah ini telah dilaksanakan oleh Desa Karangtengah untuk memaparkan hasil dari rembug RT dan mengkaji kembali terkait kebutuhan pembangunan di tingkat RT masing-masing. Menurut penulis hal ini dilakukan untuk menyatukan sebuah pemahaman terkait arah

pembangunan dan memotivasi untuk bekerja sama dalam merencanakan pembangunan untuk masyarakat. Dalam wawancara peneliti di lapangan dengan Ketua RW 03 Bapak Samiyo beliau menyampaikan⁶³ :

“Dalam musyawarah dusun atau RW kami mendiskusikan kembali mas hasil dari rembug RT masing-masing dan memilah dengan skala prioritas, disamping itu kami mengedukasi masyarakat terkait program pembangunan masyarakat dari sistem sampai tahapannya”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam menganalisis kebutuhan masyarakat ada bentuk skala prioritas tingkat dusun atau RW yang digunakan untuk memilah berbagai masalah mana yang harus segera ditangani terlebih dahulu dalam pembangunan. Hal tersebut telah sesuai dengan teori Mardikanto tentang tahapan perencanaan partisipatif yaitu adanya pengembangan masyarakat, simulasi dinamika kelompok, dan penumbuhan kerja sama. Maka dari itu dalam setiap bentuk musyawarah bersama dengan masyarakat harus ada beberapa unsur didalamnya yaitu penguatan kerjasama, keakraban, dan keterbukaan agar berjalannya musyawarah bisa berjalan dengan baik melihat ada beberapa perbedaan latar belakang dalam individu masyarakat tersebut.

4. Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Desa Karangtengah pada Tahap ini melaksanakan musyawarah dengan membahas hasil dari musyawarah dusun bersama perwakilan RW untuk melakukan skala prioritas guna memutuskan sebuah program pembangunan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitasi dimana masyarakat sendiri lah nanti yang akan memutuskan program apa yang akan direalisasikan berdasarkan keputusan bersama. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dari dulu sampai sekarang yang menjadi prioritas utama pembangunan adalah di bidang infrastruktur desa, yang meliputi penataan jalan, rabat beton, dan sarana prasarana desa. Hal ini dalam teori di Bab II menurut Mardikanto belum dicantumkannya skala prioritas dalam tahapan perencanaan partisipatif pembangunan desa.

⁶³Wawancara bersama Ketua RW 03 Baoak Samiyo pada tanggal 22 Mei 2020 Pukul : 20.20 WIB di rumah Bapak Samiyo

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa skala prioritas adalah kunci utama untuk mengukur sebuah masalah sebelum memutuskan sebuah program pembangunan.

5. Menyelenggarakan Musrenbangdes (RPJMDES)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan sebuah forum besar yang diselenggarakan oleh pemerintah desa secara terbuka di lingkungan sekitar kantor desa yang membahas tentang serangkaian kegiatan pembangunan dalam waktu 5 tahun ke depan. Kegiatan ini telah diselenggarakan Desa Karangtengah dengan mengundang masyarakat lewat surat undangan dan media informasi. Dalam kegiatan tersebut terlihat bahwa partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan ide sudah bagus, namun ada pihak yang masih kurang aktif yaitu dari Karangtaruna. Hal ini karena mayoritas pemuda Desa Karangtengah adalah pekerja pabrik dan merantau di luar kota. Adapun hasil dari MUSRENBANGDESA adalah desa focus dalam mensegerakan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama penataan jalan, rabat beton, dan saluran pembuangan air limbah (SPAL) di sekitar rumah pinggir jalan desa.

Tahap ini telah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teorinya mardikanto dalam tahap akhir yaitu simulasi dinamika kelompok, dan evaluasi dalam setiap program. Menurut penulis MUSRENBANGDESA tidak hanya membahas apa kegiatan yang harus dilaksanakan atau berapa anggaran yang harus dikeluarkan, namun sejatinya MUSRENBANGDESA membahas dan mencari solusi secara jelas dalam merealisasikan pembangunan dari awal hingga akhir dengan semangat gotong-royong. Dengan demikian sesuai apa yang dimaksud dalam Undang-Undang No.6 tentang Desa bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara bersama dengan semangat gotong-royong, mempererat kebersamaan, keakraban, dan rasa saling memiliki dalam proses pembangunan.

B. Analisis Hasil Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Di Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Undang-undang Desa sesuai dalam implementasinya harus mewujudkan hasil yang jelas dan nyata tentang perencanaan pembangunan. Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang perencanaan partisipatif pembangunan juga menyatakan bahwa perencanaan partisipatif harus melibatkan masyarakat di dalamnya dan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek atau target dari pembangunan. Dari uraian tahapan tentang perencanaan partisipatif pembangunan diatas, maka perlu adanya bukti tentang hasil yang telah dicapai dari tahapan tersebut.

Hasil yang dicapai dari Perencanaan Pembangunan secara partisipatif sekurang-kurangnya, yaitu:

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sector yang perlu perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
2. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.
3. Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumberdana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.
4. Anggota masyarakat secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

Hal ini sesuai dengan apa yang didapati peneliti dilapangan setelah diadakannya perencanaan partisipatif di Desa Karangtengah, sebagai berikut :

1. Membantu menyelesaikan masalah dan Memenuhi kebutuhan masyarakat

Upaya menyelesaikan problem di masyarakat yang terjadi diawali dengan langkah pemerintah desa membuka forum dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah sebenarnya yang dihadapi masyarakat. Setelah adanya perencanaan partisipatif yang diterapkan di Desa Karangtengah membuktikan bahwa masalah yang dihadapi adalah tentang penataan dan infrastruktur pembangunan, ada beberapa jalan akses yang

rusak, dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Hal ini segera di tangani secara bersama setelah disepakati dalam MUSRENBANGDESA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan partisipatif sudah sesuai dengan apa yang di sampaikan dalam Bab II oleh wicaksono dan sugiarto bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

Masyarakat dalam kondisi saat ini sudah merasakan dampak dari proses perencanaan partisipatif di tandai dengan terpenuhinya kebutuhan pembangunan, dan rasa ketergantungan sudah tidak dirasakan kembali, dan masyarakat sudah lebih siap dalam mengantisipasi sebuah masalah yang akan datang. Menurut peneliti ada hal lain yang dirasakan pada masyarakat adalah adanya sebuah proses pemberdayaan, karena pada saat musyawarah perencanaan masyarakat diberikan sebuah edukasi pemahaman tentang proses pembangunan oleh pemerintah desa.

2. Masyarakat lebih diperhatikan dalam menyampaikan aspirasinya

Sejak adanya konsep perencanaan partisipatif di Desa Karangtengah ini, masyarakat lebih diperhatikan dalam konteks pembangunan. Karena pada hakekatnya yang mengetahui dan merasakan adanya sebuah masalah adalah masyarakat sendiri. Maka dari itu dengan dilaksanakannya perencanaan pembangunan desa berbasis partisipatif ini, pemerintah desa sudah sangat terbuka menerima masukan dan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan prioritas desa dalam pembangunan masih terfokus pada infrastruktur di masyarakat, yang mana pada MUSRENBANGDESA sendiri masyarakat meminta untuk segera di penuhi dan di selesaikan terlebih dahulu. Karena masyarakat menilai bahwa itu kebutuhan utama mereka dalam pembangunan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa apa yang telah diasakan masyarakat selama proses perencanaan pembangunan sesuai dengan ciri-ciri perencanaan partisipatif di Bab II bahwa konsep perencanaan

partisipatif yang paling utama adalah terbuka dengan terfokus pada kepentingan masyarakat. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, serta disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

3. Meningkatkan proaktif masyarakat

Salah satu tujuan dari Perencanaan partisipatif adalah membangkitkan masyarakat dengan ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan. Desa Karangtengah sendiri setelah adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang proses pembangunan, maka masyarakat merespond secara baik dengan ikut berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan dari tahap awal hingga akhir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah selaras dengan tujuan dari perencanaan partisipatif yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sudah selaras dengan apa yang diuraikan di Bab II tentang manfaat perencanaan partisipatif bahwa adanya peran masyarakat secara langsung di dalam proses pembangunan, yang mana masyarakat tidak mengadakan seorang pakar atau ahli, namun masyarakat secara mandiri dapat menyelesaikan pembangunan tanpa campur tangan orang lain.

Proses tersebut dapat dianalisis peneliti bahwa dengan adanya perencanaan partisipatif di Desa Karangtengah masyarakat bisa bergerak secara mandiri untuk menyelesaikan segala persoalan tentang pembangunan tanpa adanya campur tangan pihak lain. Adapun hal yang dapat menunjang semangat dari masyarakat adalah dengan menguatkan rasa memiliki satu sama lain, gotong royong, dan peka terhadap keadaan lingkungan.

4. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan

Proses pembangunan masyarakat secara substansi tidak hanya sebatas membangun apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, namun ada hal lain yang lebih penting yaitu hasil dari pembangunan itu sendiri. Desa Karangtengah dalam proses pembangunan telah menyelesaikan beberapa hasil pembangunan seperti rabat beton, penataan SPAL, dan lain-

lain. Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan secara penuh dan diberi sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunannya. Hal ini ditunjukan oleh pemerintah desa agar setelah adanya pembangunan masyarakat tidak serta merta membiarkan selesai sudah, akan tetapi ada unsur rasa memiliki dari hasil pembangunan itu sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh warga RW 02 yakni dengan membersihkan SPAL setiap minggunya dan mengecor apabila ada jalan yang sedikit rusak atau berlubang. Dengan demikian proses ini telah sesuai dengan teori Sutaryat tentang tujuan pembangunan desa yaitu masyarakat yang membangun. Menurut peneliti dengan adanya proses seperti ini masyarakat lebih sadar akan rasa memiliki satu sama lain dengan saling menjaga dan memperhatikan kondisi antar sesama masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang didapat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tahapan Perencanaan Partisipatif Pembangunan di Desa Karangtengah telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu:
 - 1) Membentuk tim persiapan
 - 2) Sosialisasi kepada masyarakat
 - 3) Musyawarah Dusun
 - 4) Musyawarah Desa
 - 5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2. Hasil dari perencanaan partisipatif pembangunan di Desa karangtengah yaitu :
 - 1) Membantu dan menyelesaikan masalah tentang kebutuhan masyarakat
 - 2) Masyarakat lebih diperhatikan dalam bentuk aspirasinya
 - 3) Membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
 - 4) Menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, penggalan data, dan observasi di lapangan, maka dari hasil analisis peneliti akan memberikan rekomendasi dan saran secara objektif sesuai objek peneliti lakukan :

1. Mengoptimalkan tugas, pokok, dan fungsi dalam proses perencanaan pembangunan desa, tidak dibebankan kepada satu pihak melainkan bekerja sebagai tim.
2. Mempublikasikan segala bentuk kegiatan baik dari pemerintah desa maupun kegiatan masyarakat dalam bidang apapun.
3. Mensegerakan untuk mengaktifkan kembali pemuda karangtaruna agar dapat berpartisipasi aktif dan ikut sumbangsih dalam pembangunan di desa.

4. Tetap menjaga semangat dan solidaritas antar warga dalam menjaga kerukunan dan saling mengayomi dalam hidup bersama.
5. Mempererat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abe, Alexander. 2005 *Perencanaan Daerah Partisipatif Pembaharuan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arlanda, Bagas Tri. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Madya Pasuruan*, Jember: Universitas Jember
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1990. *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik*. Malang: Bumi Aksara
- Guntur, Setiawan. 2004 *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Indrayani, Damsar. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. “*Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mariana, Dina. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE
- Meleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Pranoto dan Rustiadi, 2007. *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*, Bogor: Crestpent Press
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variable-variable Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Hadi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sumodiningrat, Gunawan & Ari Wulandari. 2015. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sopiah Sangaji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Sutaryat, T. 1984, *Perubahan Sikap dan perubahan Sosial Dalam Konteks pembangunan dan Modernisasi*, Bandung :IKIP Bandung.
- Sutojo, Siswanto. 2012. *Manajemen Bisnis di Perusahaan di Indonesia yang Efektif*. Jakarta : Damar Mulia Pustaka.
- Trigunarso, Sri Indra& Ali Kabul Mahi. 2017.*Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: Kencana
- Usman, Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wingnyosoebroto, Soetandyo. 2009. “*Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*”. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Skripsi :

- Hakim, Abdul. 2014. *Implementasi perencanaan partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Leppaeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Hasanah, Nurul. 2017. *Analisis Perencanaan Pembangunan Perdesaan yang Partisipatif (Studi Kasus Desa Dolok Merawan)*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Rahman, Siti Nurfattimah. 2016.*Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Ulva Ariya. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jurnal :

- AS, Enjang. 2011”*Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah*”, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No.2 Edisi Juli-Desember
- Riyadi, Agus. 2014. “*Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam*”, Jurnal Komunikasi Islam Vol.6 No.2

Tesis :

- Wibowo, Agus Harto. 2009. *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*.Semarang: Universitas Diponegoro.

Undang-undang :

Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-undang No.25 tahun 2005 tentang SPPN

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Internet :

<https://alihamdan.id/implementasi/> diakses pada hari rabu 15 juli Pukul : 20.00 WIB

<https://eprints.uny.ac.id>

[http://www.Keuandangdesa.com/serial-panduan-pembangunan-desa-buku-1/8,](http://www.Keuandangdesa.com/serial-panduan-pembangunan-desa-buku-1/8)
diakses pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, pukul 06:54 WIB

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/197106141998031-JONI RAHMAT PRAMUDIA/Pembangunan Masyarakat-HO.pdf,](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/197106141998031-JONI_RAHMAT_PRAMUDIA/Pembangunan_Masyarakat-HO.pdf)
diakses pada hari Minggu, 12 Januari 2020, Pukul 01:44.WIB

[http://www.sosdea.id/detail/132/kemdes-ini-9-strategi-membangun-desa,](http://www.sosdea.id/detail/132/kemdes-ini-9-strategi-membangun-desa) diakses pada tanggal 24 Januari 2020 hari jum'at pukul 02.10 WIB

https://www.slideshare.net/stephanus_aan/perencanaan-partisipatif-42920965
diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 23.38 WIB

Lampiran

DRAFT WAWANCARA

A. Wawancara kepada aparaturn desa

1. Apakah pihak aparaturn desa sudah mengetahui dan memahami mekanisme perencanaan berbasis partisipatif ?
2. Siapa yang pertama kali mengusulkan atau menerapkan pola perencanaan partisipatif di desa karangtengah ?
3. Apakah dari pihak desa mensosialisasikan terkait mekanisme perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat ?
4. Mengapa menerapkan pola perencanaan partisipatif ?
5. Bagaimana sistem perencanaan sebelum diterapkannya sistem perencanaan partisipatif ?
6. Bagaimana pihak desa menerapkan pola perencanaan partisipatif pembangunan untuk desa ?
7. Bagaimana respond masyarakat dengan diterapkannya sistem perencanaan pembangunan berbasis partisipatif ?
8. Apa dampak yang dihasilkan setelah dilaksanakannya perencanaan partisipatif pembangunan ?
9. Apakah lebih efektif menggunakan sistem perencanaan partisipatif saat sekarang dari pada perencanaan yang sudah pernah dijalankan sebelumnya ?
10. Dalam menjalankan sistem perencanaan partisipatif, perlukah adanya adaptasi dari pihak aparaturn desa ?

B. Wawancara kepada Tokoh masyarakat/agama

1. Apakah bapak/saudara mengetahui sistem perencanaan partisipatif (perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung) ?
2. Apakah dari pihak aparaturn desa mensosialisasikan tentang sistem perencanaan partisipatif dengan masyarakat ?

3. Bagaimana respond bapak/saudara dengan sistem perencanaan partisipatif yang telah diterapkan oleh pihak aparaturnya desa ?
4. Menurut bapak apa sudah sesuai dengan harapan masyarakat setelah diterapkannya sistem perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat?
5. Apakah masyarakat dalam menyampaikan usulan tentang kebutuhannya sudah terdengar dengan adanya sistem perencanaan partisipatif yang sudah diterapkan oleh pihak desa ?
6. Apakah ada usulan terkait pembangunan dengan mengusung tema dakwah dalam kehidupan masyarakat di desa karangtengah ?
7. Bagaimana bapak merespond beberapa usulan dari masyarakat dalam sistem perencanaan partisipatif ?
8. Apakah bapak ikut terlibat secara langsung dalam tahapan proses perencanaan pembangunan desa ?
9. Bagaimana respond bapak setelah mengikuti proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa ?

C. Wawancara kepada Tokoh Pemuda/karangtaruna

1. Apakah saudara/i mengetahui sistem perencanaan partisipatif (perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung) ?
2. Apakah dari pihak aparaturnya desa mensosialisasikan tentang sistem perencanaan partisipatif dengan masyarakat terkhusus kepada pemuda desa karangtengah ?
3. Bagaimana respond saudara/i dengan sistem perencanaan partisipatif yang telah diterapkan oleh pihak aparaturnya desa ?
4. Mengapa perlu diterapkan sistem perencanaan partisipatif di desa karangtengah ?
5. Bagaimana respond saudara/i dalam menanggapi usulan dari masyarakat ?
6. Apakah sudah sesuai harapan para pemuda dengan sistem perencanaan partisipatif yang telah diterapkan oleh desa karangtengah ?

7. Apakah saudara ikut terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan desa ?
8. Bagaimana respond saudara setelah mengikuti proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa ?

D. Wawancara dengan tokoh wanita

1. Apakah saudara/i mengetahui sistem perencanaan partisipatif perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung ?
2. Apakah dari pihak aparat desa mensosialisasikan tentang sistem perencanaan partisipatif dengan masyarakat terkhusus kepada ibu-ibu di desa karangtengah ?
3. Bagaimana respond ibu dengan sistem perencanaan partisipatif yang telah diterapkan oleh pihak aparat desa ?
4. Apakah saudara ikut terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan desa ?
5. Apakah sistem perencanaan pembangunan yang diterapkan oleh desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat ?
6. Bagaimana respond ibu setelah mengikuti proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa ?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Samiyo Ketua RW 03



Wawancara dengan Ibu Suparmi Sekretaris BPD



Wawancara dengan Bapak Mustahfid Sekretaris Desa



Wawancara dengan Bapak Mulyono Ketua BPD

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukhamad Mizan
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 10 Juli 1997
Alamat : Sendang, Rt.02 Rw. 04, Kecamatan Kalinyamatan,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Email : Maszacky10@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. SDN 02 SendangJepara | Lulus Tahun 2009 |
| 2. MTS Darul Ulum Purwogondo | Lulus Tahun 2012 |
| 3. MA Al-Anwar Rembang | Lulus Tahun 2015 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Lulus Tahun 2020 |

Semarang, 30 Juni 2020

Muhammad Mizan